



**JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN**  
**YOGYAKARTA-MAGELANG**  
**P-ISSN: 1858-1226; E-ISSN: 2723-4010**



## **Studi Deskriptif Penerapan Manajemen Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul**

**Rohmat Hidayat<sup>1</sup>, Siti Nurlaela<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kabupaten Bantul

<sup>2</sup> Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

\*) Corresponding Author: [nurlaela77yk@gmail.com](mailto:nurlaela77yk@gmail.com)

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received: January, 13<sup>th</sup>, 2025

Accepted: April, 25<sup>th</sup>, 2025

Published: July, 1<sup>st</sup>, 2025

#### **Kata Kunci:**

kelas kelompok  
KWT  
manajemen

#### **Keywords:**

class group  
kwt  
management

### **ABSTRAK**

Manajemen kelompok tani sangat penting dalam menunjang produktivitas dan kinerja kelompok, namun sebagian besar KWT masih belum menerapkan manajemen kelompok dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen KWT di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian dilaksanakan pada Juli-Agustus 2023. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, kuisioner, dan observasi. Penentuan kalurahan atau desa secara *purposive* dan responden merupakan dua pengurus atau anggota aktif dari masing-masing KWT se-Kalurahan Ngestiharjo. Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan persentase penerapan fungsi manajemen: perencanaan sebesar 57,02% (kurang), pengorganisasian sebesar 47,69% (kurang), pelaksanaan sebesar 66,17% (kurang), dan pengawasan sebesar 51,54% (kurang). Penyuluh pertanian perlu melakukan pendampingan yang lebih intensif terkait penerapan manajemen, terutama aspek pengorganisasian dan pengawasan.

### **ABSTRACT**

*Farmer group management is very important in supporting productivity and group performance, but most KWTs still do not implement group management properly. This study aims to determine the implementation of the KWT management function in Ngestiharjo Village, Kapanewon Kasihan, Bantul Regency, DIY. The research was carried out in July-August 2023. The data collection method used interviews, questionnaires, and observations. The determination of the sub-district/village is purposive, and the respondents are two administrators or active members of each KWT in Ngestiharjo Village. Data processing uses descriptive analysis and a quantitative approach. The results of the study showed the percentage of implementation of management functions: planning was 57.02% (less), organizing was 47.69% (less), implementation was 66.17% (less), and supervision was 51.54% (less). Agricultural extension workers need to provide more intensive assistance related to implementing management, especially the aspects of organization and supervision.*

## **PENDAHULUAN**

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan petani yang dibentuk untuk mendorong anggota agar mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar (Kementerian Pertanian, 2016). Menurut Nuryanti dan Swastika (2011), pembentukan KWT berfungsi: 1) Memperkuat posisi tawar dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif; 2) Efisiensi diseminasi teknologi pertanian untuk menjangkau lebih banyak petani dalam satuan waktu tertentu.

Guna mencapai tujuan dibentuknya KWT, perlu adanya manajemen yang dijalankan sesuai kesepakatan pengurus dan anggotanya. Menurut Nazaruddin (2021), membuat organisasi maju diperlukan pengelolaan kelompok yang menjalankan beberapa fungsi utama manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses pemberdayaan kelompok membutuhkan peran pemimpin untuk mendorong aktivitas pemberdayaan. Pemimpin memiliki peran yang penting untuk mempengaruhi dan memotivasi petani guna mencapai tujuan bersama melalui KWT. Ketua kelompok tani memiliki peran penting meliputi peran dalam memperlancar komunikasi kelompok, meningkatkan motivasi anggota dan menyediakan fasilitas kelompok (Ashari, 2017).

Pedoman peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dari Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 telah mengatur bahwa peningkatan kemampuan kelompok tani diupayakan dengan pendekatan manajemen yang dijalankan dari tiga fungsi kelompok tani, yaitu sebagai kelas belajar, unit produksi, dan wahana kerjasama. KWT yang dijalankan oleh Ibu-ibu atau wanita memiliki peran yang strategis dalam agribisnis berkaitan pemanfaatan lahan pekarangan. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan melaksanakan usaha tani secara terpadu, berkelanjutan, dan diarahkan menuju tahap kemandirian (Rodeni dkk, 2018). Pemilihan komoditas pertanian yang diusahakan memperhatikan potensi lokal sehingga mampu berkelanjutan.

Bupati Bantul mendukung dan menginstruksikan kepada jajaran dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa” sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2016. Kalurahan Ngestiharjo merupakan salah satu kalurahan di Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dengan luas lahan pertanian yang sempit. Luas sawah 30 ha (5,9%) dari total 510 ha luas kalurahan (BPS Bantul, 2022). Ngestiharjo perlu mengoptimalkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Kalurahan Ngestiharjo berupaya untuk menyukseskan instruksi bupati dengan menumbuhkan 18 KWT terbentuk mulai tahun 2019 hingga 2021 (BPP Kasihan, 2022). KWT dibentuk dengan modal sosial berupa pendampingan dan motivasi dari PKK di masing-masing dusun atau RT dan didukung oleh kebijakan Lurah Ngestiharjo. Penumbuhan KWT diharapkan sebagai wadah merubah pola pikir petani agar mau mengembangkan usahatannya. Oleh sebab itu, kemampuan KWT dalam melaksanakan fungsinya merupakan syarat mutlak untuk mendukung tujuan penumbuhan KWT. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan KWT di Kalurahan Ngestiharjo telah banyak dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain : 1) Pelatihan untuk masing-masing KWT dari dana Kalurahan Ngestiharjo; dan 2) Pelatihan serta peningkatan kapasitas dari rintisan *start up*, dinas, dan perguruan tinggi. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2022 setelah pandemi Covid-19. Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan KWT, baik teknis budidaya, pengolahan hasil pangan, pemasaran, maupun penguatan kelembagaan.

Berbagai dukungan tersebut belum mampu membuat KWT menjalankan fungsi kelompok tani secara optimal. KWT juga belum berkembang dan belum mampu mandiri untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani anggota. Beberapa permasalahan yang ditemui adalah kurang optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk usahatani. Hal ini ditunjukkan dari 50% KWT belum memahami manajemen pengembangan demplot. 55% kelompok petani belum lengkap pencatatan administrasinya dan 60% kelembagaan petani belum melaksanakan pertemuan rutin (BPP Kasihan, 2022). Selain itu, belum adanya dampak yang dihasilkan dari pelatihan dan peningkatan kapasitas yang didukung pemerintah karena KWT belum ditindaklanjuti pada tingkat kelompok. Hal ini menandakan adanya penerapan fungsi manajemen kelompok yang masih rendah.

Manajemen KWT sangat penting diterapkan untuk menjalankan agribisnis kelompok. Manajemen yang baik akan mendukung KWT dalam merencanakan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, budidaya tanaman, sampai dengan penanganan hasil dan pemasarannya. Usahatani yang dijalankan akan berkembang menjadi usahatani yang mandiri dan produktivitas tinggi.

Penelitian Ferdinan dkk (2017) menunjukkan penerapan fungsi manajemen di Kelompok Cempaka di Kota Manado mampu mengembangkan potensi dan memotivasi anggota dalam meningkatkan pengolahan hasil produksi, akhirnya mampu meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani ke Madya pada tahun 2015. Penelitian yang dilaksanakan Muhammadun dkk (2022), menunjukkan rata-rata penerapan fungsi manajemen pada kelompok tani di Kalurahan Sumberarum, Sleman, DIY hampir seluruh kelompok tani kurang menerapkan fungsi manajemen untuk menjalankan kelompok, sehingga kelompok belum dapat terorganisir untuk mencapai kemandirian dan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berupaya untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen KWT di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada penyuluh dalam melaksanakan pendampingan kelompok.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif merupakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu berupa data yang diolah sedemikian rupa dan sebagaimana adanya tanpa bermaksud dibuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Cakupan wilayah penelitian adalah Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Kapanewon Kasihan dan Kalurahan Ngestiharjo dipilih secara *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa kelompok wanita tani yang ada lebih banyak dari wilayah lain dan KWT nya masih relatif baru. Selain itu lokasi penelitian merupakan wilayah binaan peneliti sebagai seorang penyuluh pertanian. Kalurahan Ngestiharjo salah satu kalurahan di Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dengan luas lahan pertanian yang sempit. Luas sawah 30 ha (5,9%) dari total 510 ha luas kalurahan (BPS Bantul, 2022). Ngestiharjo perlu mengoptimalkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui penumbuhan KWT.
2. Penentuan kelompok wanita tani dipilih secara *purposive sampling* yaitu KWT yang ditumbuhkan tahun 2019-2021 sejumlah 18 KWT dan semuanya termasuk kelas pemula.
3. Pengambilan sampel atau responden disetiap KWT dengan pertimbangan responden mengerti tentang manajemen kelompok dan aktif dalam pertemuan atau kegiatan (Muhammadun, 2022). Masing-masing KWT diambil dua pengurus dan atau anggota aktif sehingga jumlah responden dalam penelitian berjumlah 36 petani.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan langkah-langkah:

1. Merekapitulasi seluruh data yang diperoleh ke dalam tabel tabulasi data untuk mengetahui jumlah skor yang diperoleh dari setiap alat ukur atau instrumen
2. Data dalam bentuk skor dihitung jumlah, rata-rata, dan persentase secara kumulatif
3. Nilai skor jawaban dari responden untuk menilai penerapan fungsi manajemen diukur dengan empat kategori menggunakan skala *likert* meliputi:
  - a. Selalu menerapkan : skor 4
  - b. Sering menerapkan : skor 3
  - c. Kadang-kadang menerapkan : skor 2
  - d. Tidak menerapkan : skor 1
4. Skor dari pertanyaan dihitung interval kelas dengan cara membagi jarak kelas dengan banyak atau jumlah kelas (Muhammadun, 2022).

$$\text{jarak kelas} = \text{skor maksimal} - \text{skor minimal}$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{jarak kelas}}{\text{jumlah kelas}}$$

Keterangan:

Nilai maksimal : 3 (dengan asumsi 100%)

Nilai minimal : 1 (dengan asumsi 33,33%)

Sehingga interval kelas dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Interval} = \frac{100\% - 33,33\%}{3} = 22,22\%$$

Selanjutnya hasil dari skor nilai capaian dapat dianalisis ke dalam 3 kategori penerapan fungsi KWT yang telah ditentukan tersebut. Kemudian dihitung jumlah persentase capaian responden dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah keseluruhan sebagai berikut:

Tinggi = Jika skor yang dicapai antara 77,78% – 100%

Sedang = Jika skor yang dicapai antara 55,56% – 77,77%

Rendah = Jika skor yang dicapai antara 33,33% – 55,55%

5. Data dalam bentuk skor tersebut yang didapat dari jawaban kuesioner dimasukkan dalam tabel skor pernyataan pada setiap responden. Kemudian hasil olah data diakumulasi untuk seluruh responden dalam variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bentuk kerangka tabel dengan nilai penerapan fungsi manajemen berdasarkan skor pada kuesioner yang dikategorikan menjadi tiga yaitu:

Menerapkan	= Jika skor yang dicapai antara 77,78% – 100%
Kurang menerapkan	= Jika skor yang dicapai antara 55,56% – 77,77%
Tidak menerapkan	= Jika skor yang dicapai antara 33,33% – 55,55%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

#### Umur responden

Usia manusia berdasarkan produktivitas kerja dapat dibedakan tiga kelompok umur menurut yaitu umur belum produktif (<15 tahun), produktif (15-64 tahun), dan pascaproduktif (>64 tahun) (BPS, 2018). Karakteristik responden menurut umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Menurut Umur

No	Umur (th)	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	0 – 14	0	0
2	15 – 64	34	94,4
3	>64	2	5,6
Jumlah		36	100

Tabel 1 menunjukkan responden sebanyak 34 orang atau 94,4% termasuk kategori produktif dan dua orang pascaproduktif atau 5,6%. Menurut Puspita, dkk (2023), umur petani berhubungan sangat signifikan dengan tingkat adopsi inovasi. Responden yang merupakan pengurus dan anggota aktif KWT dapat dikatakan sebagai orang terdepan yang memberikan contoh tentang penerapan teknologi di tingkat kelompok. Pengurus merupakan orang yang dipilih dan dihormati karena dinilai memiliki kemampuan lebih baik dibanding dengan anggotanya dengan mempertimbangkan umur yang masih sehat atau produktif. Umur yang produktif menjadi modal yang dimiliki pengurus untuk mengelola KWT.

#### Tingkat pendidikan responden

Sebagian besar pengurus KWT di Kalurahan Ngestiharjo adalah tokoh masyarakat dan lulusan perguruan tinggi yang menjadi penggerak KWT untuk maju dan bisa berkembang. Menurut Kurnadi (2011), petani golongan *early adopter* atau pengetrap dini memiliki status sosial dan pendidikan *relative* tinggi dan mampu mempengaruhi anggota lain dalam mengadopsi inovasi. Mereka berperan mengakses sumber-sumber informasi dalam agribisnis dan manajemen kegiatan KWT. Anggota KWT lainnya mengikuti arahan pengurus melalui kesepakatan kelompok secara demokratis.

Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	3	8,33
4	SMA/SMK	17	47,22
5	Perguruan Tinggi	16	44,45
Jumlah		36	100

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden sebagian besar lulus SMA/SMK sebesar 17 orang (47,22%), sedangkan lulusan perguruan tinggi sebanyak 16 orang (44,45%) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Semakin tinggi pendidikan, semakin mudah KWT menerima inovasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurnadi (2011). Berdasarkan kondisi latar belakang pendidikan yang sebagian SMA/SMK, anggota KWT mampu menerima berbagai informasi maupun inovasi yang akan disampaikan.

**Jabatan sosial lain yang diemban selain KWT**

Responden yang merupakan pengurus dan anggota aktif tidak hanya aktif mengelola KWT, tetapi juga diamanahi beberapa jabatan lain di lembaga sosial kemasyarakatan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus potensi bagi perkembangan KWT. Banyaknya relasi dan pengalaman berorganisasi di jabatan lainnya, membuat KWT lebih mudah dalam bermitra, berjejaring, dan bertukar informasi. Perlu adanya pendelegasian wewenang ke pengurus lainnya jika ada kegiatan bersamaan antara KWT dan lembaga lainnya. Hal ini membuat responden tetap mampu mengelola KWT di antara kesibukan lainnya. Sesuai dengan penelitian Nurmayasari dan Ilyas (2014) bahwa salah satu faktor pendukung kelancaran kegiatan di KWT adalah kerjasama yang baik dari anggota KWT lainnya, salah satunya adalah pendelegasian wewenang. Karakteristik responden menurut jabatan sosial yang diemban selain KWT ditunjukkan di Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

No	Jabatan sosial yang diemban selain KWT	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	KWT saja	3	8,33
2	1 jabatan lain	10	27,78
3	Jabatan lain >1	23	63,89
Jumlah		36	100

Peran kemasyarakatan membutuhkan jiwa sosial yang tinggi sehingga tidak semua orang bersedia menjadi pengurus. Beberapa pengurus juga menjadi pengurus di organisasi kemasyarakatan lain selain di KWT (tabel 3). Sebanyak 23 responden mempunyai jabatan sosial lain lebih dari satu, 10 responden dengan satu jabatan sosial lain, dan 3 responden yang hanya sebagai pengurus KWT. Dari 33 responden yang mempunyai jabatan sosial lain selain KWT, sebanyak 27 adalah pengurus PKK, diikuti 13 orang menjadi pengurus di posyandu atau posbindu, empat orang pengurus bank sampah, dan tiga orang di kegiatan PAUD. Jabatan lainnya adalah kepengurusan di dasa wisma, bank sampah, serta organisasi lainnya.

**Kepemilikan Lahan Pekarangan untuk Demplot KWT**

Demplot atau demonstrasi plot di dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu instrumen yang wajib ada di KWT. Adanya demplot mampu mendukung kegiatan KRPL karena sebagai lokasi percontohan, temu lapangan, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama kelompok (Kementerian Pertanian, 2019). Demplot biasanya dilakukan pada lahan pekarangan yang mudah akses untuk perawatan dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan komoditas atau tanaman.

Menurut Kementerian Pertanian (2016), luas berdasarkan luas lahan pekarangan dan pemanfaatannya, diperoleh 3 kategori luas pekarangan yaitu pekarangan sempit (< 100m<sup>2</sup>), pekarangan sedang (100-300m<sup>2</sup>) dan pekarangan luas (> 300m<sup>2</sup>). Karakteristik responden menurut luas kepemilikan lahan secara rinci seperti dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Kepemilikan Lahan Pekarangan untuk Demplot KWT

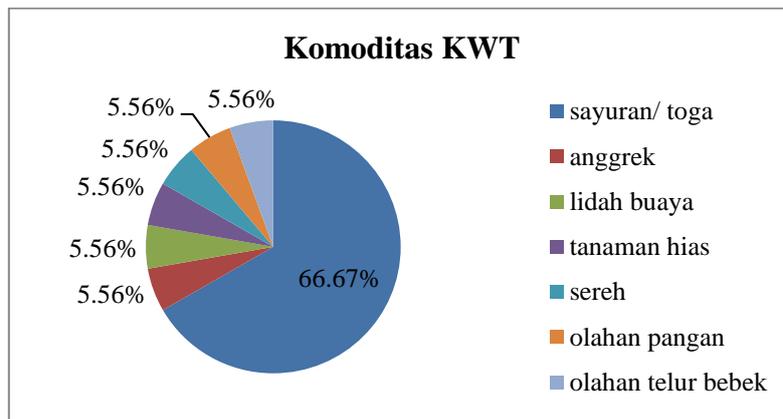
No	Klasifikasi luas pekarangan (m <sup>2</sup> )	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada demplot	10	27,78
2	<100	14	38,89
3	100-300	12	33,33
4	>300	0	0
Jumlah		36	100

Tabel 4 menunjukkan sebanyak 14 responden/ 7 KWT memiliki demplot dengan kategori sempit (38,89%); 12 responden/ 6 KWT memiliki demplot dengan kategori sedang (33,33%). Kalurahan Ngestiharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dengan kepadatan penduduk yang tinggi membuat demplot menjadi hal yang tidak mudah untuk dimiliki oleh KWT. Data menunjukkan 10 responden/ 5 KWT tidak punya demplot. Kegiatan usahatani dilaksanakan di rumah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan evaluasi pembelajaran di tingkat KWT sehingga diharapkan penerapan teknologi berhasil.

**Komoditas Unggulan KWT**

Masing-masing KWT mengembangkan komoditas unggulan hortikultura dan menghasilkan produk unggulan. Menurut Kementerian Pertanian (2012), produk unggulan hortikultura adalah produk hortikultura yang memiliki potensi daya saing, berorientasi pasar, dan memperhatikan potensi lokal. Komoditas tersebut dikembangkan mulai dari budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Pengembangan KWT berdasarkan komoditas didukung oleh Lurah Ngestiharjo karena memudahkan pemetaan pemberdayaan masyarakat. Sebaran komoditas unggulan KWT di Ngestiharjo dapat dilihat pada Gambar 1.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang syarat dan tata cara penetapan produk unggulan hortikultura.



Gambar 1. Diagram komoditas unggulan KWT

Data menunjukkan sebanyak 12 KWT (66,67%) mengembangkan sayuran atau toga, sedangkan masing-masing KWT (5,56%) lainnya mengembangkan anggrek, lidah buaya, tanaman hias, sereh, dan olahan pangan. Pemerintah kalurahan menargetkan agar tiap KWT mampu menjual produk dari komoditas unggulan pada setiap kegiatan kalurahan dengan disediakannya *stand*.

**Penerapan Fungsi Manajemen**

**1. Aspek Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah awal dengan menetapkan rencana pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan adalah tindakan untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai suatu organisasi. Perencanaan juga mencakup penetapan rencana dalam proses kerja untuk proses integrasi demi tercapainya tujuan (Wijaya dan Rifai, 2016).

Perencanaan kelembagaan petani dalam hal ini KWT dikaitkan dengan tiga tujuan utama kelompok, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.

Tabel 5. Rekapitulasi Capaian penerapan fungsi manajemen aspek perencanaan

No	Aspek	Persentase (%)	Kategori
1	Kelas belajar	56,94	Kurang menerapkan
2	Wahana kerjasama	57,87	Kurang menerapkan
3	Unit produksi	56,25	Kurang menerapkan
	Rata-rata	57,02	Kurang menerapkan

Tabel 5 menunjukkan bahwa aspek kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi termasuk dalam kategori kurang menerapkan. Distribusi jawaban petani terhadap aspek perencanaan ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi petani terhadap perencanaan

No	Kategori	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1	Menerapkan	77,78-100	6	16,67
2	Kurang menerapkan	55,56-77,77	14	38,89
3	Tidak menerapkan	33,33-55,55	16	44,44
	Rata-rata		36	100

Berdasarkan Tabel 6, hasil tabulasi jawaban responden menunjukkan terdapat 16 responden atau sebagian besar kelompok mengemukakan belum atau tidak menerapkan perencanaan kelompok dengan presentase 44,44%. Berikut hasil jawaban pernyataan fungsi perencanaan pada kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi secara terperinci dapat di lihat di Tabel 7.

Tabel 7. Penerapan Aspek Perencanaan

No	Pernyataan	Rerata	Persentase (%)	Kategori
1	Adanya perencanaan belajar	2,28	56,94	Kurang menerapkan
2	Perencanaan musyawarah untuk menentukan keputusan	2,61	65,28	Kurang menerapkan
3	Perencanaan kerjasama dan kemitraan usaha	2,28	56,94	Kurang menerapkan
4	Merencanakan penggunaan limbah rumah tangga	2,06	51,39	Tidak menerapkan
5	Merencanakan membuat pupuk sendiri menggunakan limbah rumah tangga	2,11	52,78	Tidak menerapkan
6	Merencanakan menerapkan pengendalian OPT secara PHT	2	50	Tidak menerapkan
7	Menyusun kebutuhan usaha bersama kelompok	2,44	61,11	Kurang menerapkan
8	Perencanaan usaha bersama	2,06	51,39	Tidak menerapkan
	Rerata	2,28	57,02	Kurang menerapkan

Tabel 7 menunjukkan bahwa perencanaan musyawarah untuk menentukan keputusan merupakan pernyataan dengan persentase tertinggi dengan capaian 65,28% / kategori kurang menerapkan. Beberapa KWT merencanakan pertemuan rutin yang telah disepakati sebelumnya untuk membahas kegiatan kelompok secara musyawarah untuk menentukan keputusan kelompok. Ketua KWT akan mendiskusikan secara musyawarah melalui pertemuan kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, baru 4 KWT yang telah melaksanakan pertemuan rutin baik bulanan maupun selapanan (35 hari sekali sesuai kalender jawa). 11 KWT lainnya melaksanakan pertemuan secara insidental atau jika diperlukan, dan 3 KWT yang tidak melaksanakan pertemuan rutin. KWT yang melaksanakan pertemuan rutin akan mendukung kemajuan KWT. Pertemuan menjadi tempat untuk transfer teknologi, meningkatkan keakraban, dan pengambilan keputusan secara musyawarah.

Selanjutnya, untuk pernyataan dengan capaian terendah adalah perencanaan pengendalian OPT secara PHT. Kegiatan ini juga termasuk dalam perencanaan pelestarian lingkungan. Sebagian besar KWT belum merencanakan secara tertulis, namun dilakukan secara incidental sesuai kebutuhan di usahataninya. Penerapan PHT dimulai dari merencanakan dengan pencegahan serangan OPT, sehingga diperlukan untuk membuat rencana kegiatan. KWT masih belum memahami tentang PHT.

Capaian fungsi perencanaan pada unit produksi adalah yang terendah (Tabel 5). Perencanaan unit produksi terdiri dari menyusun kebutuhan usaha bersama kelompok dan perencanaan usaha bersama. Perencanaan yang dilakukan sebagian besar KWT tidak dilakukan secara tertulis. Kesepakatan yang diperoleh saat pertemuan dilaksanakan melalui diskusi. Kesepakatan yang tidak tertulis menyebabkan kegiatan yang akan dilaksanakan akan cenderung berubah. Evaluasi kegiatan yang tidak direncanakan secara tertulis akan menjadi sulit dilakukan karena indikator keberhasilan tidak jelas. Sejalan dengan hasil penelitian Magdalena et al (2020), tidak ada perencanaan yang jelas membuat hasil kurang maksimal dan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan evaluasi secara menyeluruh.

## 2. Aspek Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam kelompok merupakan kegiatan mengelola sumber daya yang ada dengan tugas dan komunikasi yang jelas. Pengorganisasian yang dikerjakan secara efektif dapat menjelaskan siapa yang bertugas melakukan apa, menjelaskan saluran – saluran komunikasi, dan memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran (Wijaya dan Rifa’I, 2016). Penerapan aspek pengorganisasian pada aspek kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Penerapan Fungsi Manajemen Aspek Pengorganisasian

No	Aspek	Persentase (%)	Kategori
1	Kelas belajar	38,89	Tidak menerapkan
2	Wahana kerjasama	62,50	Kurang menerapkan
3	Unit produksi	41,67	Tidak menerapkan
	Rata-rata	47,69	Tidak menerapkan

Tabel 8 menunjukkan rerata capaian aspek pengorganisasian adalah 47,69 / kategori tidak menerapkan. Distribusi jawaban petani terhadap aspek pengorganisasian ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Distribusi Petani pada Aspek Pengorganisasian

No	Kategori	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1	Menerapkan	77,78-100	0	0
2	Kurang Menerapkan	55,56-77,77	16	44,44
3	Tidak Menerapkan	33,33-55,55	20	55,56
	Rata-rata		36	100

Jika dilihat persentase distribusi menurut kategori di tabel 9, sebagian besar responden atau 20 responden (55,56%) yang masuk kriteria tidak menerapkan. Pernyataan kuesioner pengorganisasian KWT dapat di lihat di Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Penerapan Aspek Pengorganisasian

No	Pernyataan	Rerata	Persentase (%)	Kategori
1	Adanya aturan dan norma	1,56	38,89	Tidak menerapkan
2	Adanya struktur organisasi	2,5	62,5	Kurang menerapkan
3	Mengelola administrasi	1,67	41,67	Tidak menerapkan
	Rerata	1,91	47,69	Tidak menerapkan

Pengorganisasian pada kelas belajar adalah adanya aturan dan norma. Rerata jawaban responden adalah 1,56 (38,89%) atau tidak menerapkan. Sebagian besar KWT belum menerapkan aturan dan norma yang jelas dan tertulis. Aturan dan norma menjadi pedoman yang harus ditaati oleh anggota KWT. Contoh dari pengaplikasian aturan dan norma adalah aturan saat mengikuti pembelajaran, kewajiban untuk mempraktekkan hasil pelatihan dari masing-masing peserta, dan lain-lain. Salah satu dampaknya adalah lambatnya tindak lanjut dari pelatihan yang telah diberikan dan menurunkan keaktifan anggota dalam kegiatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Qomaria (2019) bahwa norma dan aturan yang tidak dilaksanakan akan membuat keaktifan anggota menurun.

Pengorganisasian pada wahana kerjasama adalah adanya struktur organisasi. Rerata jawaban responden adalah 2,5 (62,5%) atau kurang menerapkan. Struktur organisasi yang efektif terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ada seksi-seksi yang mendukung. Dalam divisi atau seksi terbagi beberapa tugas dan dijalankan dengan baik oleh masing-masing anggota. Sebagian besar KWT di Ngestiharjo memiliki struktur organisasi kompleks (ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi), ada pembagian tugas dan tertulis, namun belum dilaksanakan secara tertib. Seksi belum memiliki kinerja efektif, belum mandiri, dan gagasan masih terpusat di ketua KWT. Struktur kelompok yang saling kerjasama akan mampu meningkatkan kinerja kelompok tani (Suharyon dan Busyra, 2016).

Pengorganisasian pada unit produksi adalah adanya pengelolaan administrasi. Rerata jawaban responden adalah 1,67 (41,67%) atau tidak menerapkan. Kementan (2018) menjelaskan bahwa buku administrasi yang dimiliki oleh kelembagaan tani yang maju (kelas utama) antara lain buku anggota, buku

tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran atau tabungan, buku inventaris, dan buku rencana kegiatan. KWT di Ngestiharjo seluruhnya termasuk dalam kelompok pemula (BPP Kasihan, 2022). Sebagian besar KWT baru memiliki pembukuan sampai dengan lima buku administrasi, antara lain buku anggota, buku tamu, buku notulen, buku daftar hadir, dan buku kas. KWT yang telah mengelola unit usaha bersama selalu rutin mencatat keuangan di buku kas. Pencatatan buku kas dilaporkan secara rutin melalui pertemuan rutin, diskusi informal, atau melalui WhatsApp group KWT.

### 3. Aspek Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan atau *actuating* adalah proses dalam membuat rencana menjadi sebuah tahapan atau tindakan yang aktual. *Actuating* adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Niswah dan Setiawan, 2021). Rekapitulasi capaian penerapan fungsi manajemen pada aspek pelaksanaan terhadap tujuan kelompok kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi yang ditunjukkan pada tabel 11.

Tabel 11. Rekapitulasi Capaian Penerapan Fungsi Manajemen Aspek Pelaksanaan

No	Aspek	Persentase (%)	Kategori
1	Kelas belajar	57,99	Kurang menerapkan
2	Wahana kerjasama	63,43	Kurang menerapkan
3	Unit produksi	77,08	Kurang menerapkan
	Rata-rata	66,17	Kurang menerapkan

Tabel 11 menunjukkan rerata capaian aspek pelaksanaan adalah 66,17% termasuk dalam kategori kurang menerapkan. Aspek unit produksi merupakan aspek dengan capaian tertinggi mencapai 77,08%. Distribusi jawaban petani terhadap aspek pelaksanaan ditunjukkan pada tabel 12.

Tabel 12. Distribusi Petani terhadap Pelaksanaan

No	Kategori	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1	Menerapkan	77,78-100	8	22,22
2	Kurang Menerapkan	55,56-77,77	22	61,11
3	Tidak Menerapkan	33,33-55,55	6	16,67
	Rerata		36	100

Tabel 12 menunjukkan sebanyak 22,22% atau 8 responden yang menyatakan telah menerapkan manajemen di aspek pelaksanaan. Tetapi, sebagian besar responden menunjukkan kurang menerapkan pada aspek pelaksanaan yaitu 22 responden (61,11%). Sebaran **persentase** setiap pernyataan secara terperinci tentang pelaksanaan pada KWT di Ngestiharjo dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pernyataan Penerapan Pelaksanaan

No	Pernyataan	Rerata	Persentase (%)	Kategori
1	Pertemuan rutin	2,47	61,81	Kurang menerapkan
2	Pelaksanaan belajar	2,17	54,17	Tidak menerapkan
3	Pemupukan modal	2,33	58,33	Kurang menerapkan
4	Menjalin kemitraan atau kerja sama	2,39	59,72	Kurang menerapkan
5	Menggunakan limbah rumah tangga untuk usahatani	2,94	73,61	Kurang menerapkan
6	Membuat pupuk sendiri menggunakan limbah rumah tangga	2,78	69,44	Kurang menerapkan
7	Menerapkan pengendalian OPT secara PHT	2,94	73,61	Kurang menerapkan
8	Melaksanakan usaha bersama	3	75	Kurang menerapkan
9	Menerapkan teknologi sesuai rekomendasi	3,17	79,17	menerapkan
	Rerata	2,65	66,17	Kurang menerapkan

Data menunjukkan capaian tertinggi dari aspek pelaksanaan adalah item pernyataan penerapan teknologi sesuai rekomendasi (79,17%), termasuk menerapkan. Kegiatan usahatani yang dilakukan oleh sebagian besar KWT masih dalam subsistem budidaya. Masing-masing KWT sudah menerapkan teknologi budidaya sesuai rekomendasi dan mampu produksi dengan hasil panen yang bagus. Kegiatan budidaya dilaksanakan di demplot dan menjadi usaha bersama di KWT. Terlihat dari capaian dengan rerata 3 (75%). Hasil panen dijual untuk menambah kas KWT dan dibagi anggota. Kegiatan ini mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga anggota KWT karena tidak perlu membeli sayuran lagi sesuai dengan hasil penelitian Nurmayasari dan Ilyas (2014) serta mudah dipasarkan (Nurlaela et al., 2022).

Namun demikian, pengembangan agribisnis harus ditingkatkan ke kemampuan pengolahan dan pemasaran. Pelatihan tentang pengolahan dan pemasaran belum ditindaklanjuti oleh KWT secara optimal.

Capaian terendah dari aspek pelaksanaan adalah item pernyataan pelaksanaan belajar (54,17%), termasuk tidak menerapkan. Pusluhtan (2012) menjelaskan bahwa kelompok melaksanakan belajar dengan berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi atau konsultasi ke sumber informasi. Sebagian besar KWT belum mampu melaksanakan pembelajaran mandiri secara rutin. Pembelajaran di KWT dilaksanakan sesekali dalam beberapa pertemuan dan diselenggarakan dengan dukungan dana dari pemerintah desa dan dinas setempat.

#### 4. Aspek Pengawasan

Pengawasan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah manajemen dapat tercapai (Amiruddin,2016). Pengawasan berperan penting demi menjaga kegiatan kelompok atau proses di kelompok berlangsung sesuai yang direncanakan dan tidak menyimpang. Fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya pengawasan yang baik. Distribusi petani dalam aspek pengawasan ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Petani terhadap Pengawasan

No	Kategori	Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1	Menerapkan	77,78-100	0	0
2	Kurang menerapkan	55,56-77,77	16	44,44
3	Tidak menerapkan	33,33-55,55	20	55,56
Rata-rata				100

Tabel 14 menunjukkan 20 responden (55,56%) tidak menerapkan manajemen aspek pengawasan. Sebaran persentase setiap pernyataan secara terperinci tentang pengawasan di KWT Ngestiharjo dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Pernyataan Penerapan Pengawasan

No	Pernyataan	Rerata	Persentase (%)	Kategori
1	Evaluasi perencanaan	2,17	54,17	Tidak menerapkan
2	Evaluasi kinerja organisasi/ kelembagaan	1,44	36,11	Tidak menerapkan
3	Evaluasi pelaksanaan pertemuan	2,11	52,78	Tidak menerapkan
4	Evaluasi hasil belajar	2,28	56,94	Kurang menerapkan
5	Evaluasi pemupukan modal	2,28	56,94	Kurang menerapkan
6	Evaluasi pelaksanaan kemitraan	1,89	47,22	Tidak menerapkan
7	Evaluasi usaha bersama	2,78	69,44	Kurang menerapkan
8	Evaluasi pelaksanaan rekomendasi teknologi	2,17	54,17	Tidak menerapkan
9	Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan	1,83	45,83	Tidak menerapkan
Rerata		2,10	51,54	Tidak menerapkan

Capaian tertinggi aspek pengawasan adalah evaluasi usaha bersama dengan rerata 2,78 (69,44%) termasuk kategori kurang menerapkan. Unit usaha bersama KWT di subsistem budidaya. Hasil panen dijual dan menjadi sumber pendapatan utama KWT. Diperlukan evaluasi dan rembug evaluasi berlangsung dalam

pertemuan dan diskusi secara informal antaranggota di demplot. Adanya evaluasi adalah usaha memperbaiki hasil kegiatan untuk selanjutnya dan indikator adanya keberlanjutan penerapan teknologi pekarangan. Menurut Aprilia dan Barlan (2019), penerapan teknologi pekarangan terdiri dari keberlanjutan produksi, keberlanjutan kemitraan, dan keberlanjutan ekonomi.

Capaian terendah aspek pengawasan adalah evaluasi kinerja organisasi dengan rerata 1,44 (36,11%) termasuk kategori tidak menerapkan. Rendahnya evaluasi karena masih lambat regenerasi pengurus KWT selanjutnya. Sebagian besar KWT belum ada penentuan berapa tahun lama kepengurusan KWT. Lambatnya regenerasi karena rendahnya minat menjadi ketua KWT yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan waktu yang luang.

Berikut adalah Tabel 16 rangkuman atau rekapitulasi penerapan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan:

Tabel 16. Rekapitulasi Penerapan Fungsi Manajemen KWT di Kalurahan Ngestiharjo

Aspek Manajemen	Hasil	Kategori
Perencanaan	57,02	Kurang menerapkan
Pengorganisasian	47,69	Tidak menerapkan
Pelaksanaan	66,17	Kurang menerapkan
Pengawasan	51,54	Tidak menerapkan

## KESIMPULAN

Penerapan fungsi manajemen KWT di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan masuk dalam kategori kurang menerapkan dengan persentase capaian sebesar 55,6%. Capaian tertinggi terdapat pada aspek pelaksanaan sebesar 66,17% termasuk dalam kategori kurang menerapkan dan capaian terendah adalah aspek pengorganisasian sebesar 47,69% termasuk dalam kategori tidak menerapkan.

Diperlukan penyuluhan persuasif tentang pentingnya manajemen, terutama pengorganisasian dan pengawasan. Sebagian besar latar belakang pendidikan pengurus KWT adalah SMA/SMK, mampu menerima berbagai informasi maupun inovasi yang akan disampaikan. Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo maupun Dinas Pertanian yang telah memberikan bantuan bersama dengan penyuluh pertanian diharapkan dapat melakukan pendampingan lebih intensif terutama pada yang paling kurang yaitu, aspek pengorganisasian dan pengawasan bantuan yang telah diberikan perlu dievaluasi secara periodik, sehingga dengan adanya pendampingan dan evaluasi yang terprogram, penerapan fungsi manajemen dapat meningkat lebih baik.

## REFERENSI

- Anonim. (2018). Pedoman Peningkatan Kelas Kemampuan kelompok tani. Jakarta: BPPSDMP.
- Anonim. (2016). Peraturan Menteri Pertanian No 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Anonim. (2016). Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, No 12/KPTS/KN.210/K/02/2016.
- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI* Oktober 2016.
- Aprillia R., & Barlan Z. A. (2020). Hubungan antara Dinamika Kelompok dengan Keberlanjutan Kelembagaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 99-112. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.99-112>.
- Ashari, Devi Indriyani. (2017). *Pengaruh Kepemimpinan Kontak Tani terhadap Dinamika Kelompok Tani (Studi Kasus Kec. Ambulu Kabupaten Jember)*. Universitas Jember: skripsi.
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kasihan. (2022). Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Desa Ngestiharjo 2023. Yogyakarta: BPP Kasihan.
- BPS. (2018). Usia Produktif. <https://jateng.bps.go.id/backend/images/Komposisi-Penduduk-Menurut-Kelompok-Umur-2019-ind.jpg> Diakses 17 September 2023.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (2022). Buku Data Agregat Kependudukan Kab Bantul Semester 1 Tahun 2022. Disdukcapil Kab Bantul: Bantul.
- Ferdinan, KR, Melsje Y. Memah, Grace A. J. Rumagit. (2017). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Kelompok Tani Cempaka di Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 3A*, November 2017: 303-312

- Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, & Raafiza Putri. (2020). Pentingnya Evaluasi dalam Pembelajaran dan Akibat Memanipulasinya. Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020. Bintang : *Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 2*, Agustus 2020; 244-257 <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.
- Kementerian Pertanian. (2019). Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019. Kementerian Pertanian:Jakarta.
- Kurnadi, Dedy. (2011). Dasar-dasar penyuluhan Pertanian. STPP Bogor, Bogor.
- Muhammadun. (2022). Penerapan Fungsi Manajemen pada Kelompok Tani di Kalurahan Sumberarum, Kepanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Tugas Akhir, Polbangtan Yogyakarta Magelang.
- Nazaruddin. (2021). Manajemen Usahatani Padi di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tunas Harapan Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan.
- Nurlaela, S., Bihrajihant Raya, A., & Hariadi, S. S. (2022). Information Technology Utilization Of Young Educated Farmers In Agricultural Entrepreneurship. *Agro Ekonomi*, 33(1). <https://doi.org/10.22146/ae.64524>.
- Nurmayasari, D., & Ilyas, I. (2014). Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/jnece.v3i2.3728>.
- Nuryanti S, Swastika DKS. (2011). Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 29 No. 2*, Desember 2011):115-128.
- Puspita, Y. H., Sugihardjo, & Suwanto. (2023). Hubungan Karakteristik Petani dengan Tingkat Adopsi Inovasi OPIP Padi 400 di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 47(1), 45-55. doi: <http://dx.doi.org/10.20961/agritexts.v47i1.70474>.
- Qomaria, Lailatul (2019) Peran Modal Sosial Kelompok Wanita Tani (KWT) Tirta Alami Terhadap Pengembangan Program Kampung Unggulan Komoditas Pertanian di Kampung Jahe Kelurahan Petamanan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Rodeni, Deni, Amran Jaenudin, Subandi. (2018). Hubungan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Ketahanan Pangan Keluarga. (Kasus Program P2KP pada KWT Silih Asih di Desa Buniasih, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan). *Jurnal Agrijati Vol 32 No 2*, April 2018.
- Soekartawi. (2005). *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. UI Press. Jakarta.
- Suharyon dan Busyra BS. (2016). Kinerja Kelompok Tani dalam Sistem Usahatani Padi Lahan Sub Optimal dan Metode Pemberdayaannya (Studi kasus pada kegiatan padi sawah di lahan sub optimal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora: Volume 18, Nomor 1, Hal. 78-85* Januari - Juni 2016.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uswatun Niswah, Muhamad Rizal Setiawan. (2021). Implementasi Fungsi Actuating dalam Pembinaan Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 115-132*.
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.